

**EVALUASI KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) DI KOTA METRO**

(Skripsi)

Oleh

IRFAN FACHRI

NPM. 2016041068



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KOTA METRO

Oleh

Irfan Fachri

Sistem zonasi merupakan kriteria utama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan. Sebelum mengadopsi sistem zonasi, dalam pelaksanaan PPDB di seluruh tingkat pendidikan di Indonesia, penilaian utama didasarkan pada Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN). Ini mengakibatkan terbentuknya sekolah-sekolah unggulan atau favorit yang lebih diminati dan sekolah-sekolah pinggiran atau kurang diminati. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas pendidikan adalah dengan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Melalui sistem zonasi ini, siswa yang tinggal dekat dengan sekolah memiliki peluang lebih besar untuk diterima di lembaga pendidikan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB di SMP Negeri Kota Metro, khususnya SMP N 1 Metro dan SMP N 8 Metro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMP N 1 Metro dan SMP N 8 Metro sudah berjalan cukup baik apabila dinilai dari 4 indikator evaluasi kebijakan menurut Bridgman & Davis (2000) yaitu *input, process, outputs dan outcomes*. Namun, diketahui bahwa sistem zonasi hanya berdampak pada siswa yang merata, tetapi tidak diikuti dengan pemerataan kualitas pendidikan di Kota Metro. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan kualitas guru, fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah di SMP N 1 Metro dan SMP N 8 Metro.

Kata Kunci: *Kebijakan Sistem Zonasi, Pemerataan, Kualitas Pendidikan*

ABSTRACT

EVALUATION OF ZONING POLICY IN ACCEPTING NEW STUDENTS (PPDB) AT JUNIOR HIGH SCHOOL (SMP) LEVEL IN METRO CITY

By

Irfan Fachri

The zoning system is the main criterion in Admission of New Students (PPDB) which considers the distance between the prospective student's residence and the educational unit. Before adopting the zoning system, in implementing PPDB at all levels of education in Indonesia, the main assessment was based on School Grades or National Examination Scores (NUN). This results in the formation of superior or favorite schools that are more popular and fringe or less popular schools. One of the government's efforts to improve and equalize the quality of education is to implement a zoning system in admitting new students. Through this zoning system, students who live close to schools have a greater chance of being accepted into these educational institutions. This research aims to evaluate the implementation of the zoning system policy in the implementation of PPDB in Metro City State Middle Schools, especially SMP N 1 Metro and SMP N 8 Metro. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The results of the research show that the implementation of the PPDB zoning system at SMP N 1 Metro and SMP N 8 Metro has gone quite well when assessed from the 4 policy evaluation indicators according to Bridgman & Davis (2000), namely input, process, outputs dan outcomes. However, it is known that the zoning system only has an impact on students evenly, but is not followed by equal distribution of the quality of education in Metro City. This can be seen from the differences in teacher quality and school facilities at SMP N 1 Metro and SMP N 8 Metro.

Keywords: Zoning System Policy, Equality, Education Quality

**EVALUASI KEBIJAKAN ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) DI KOTA METRO**

Oleh

IRFAN FACHRI

Skripsi

**Sebagai Salah Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DI KOTA METRO**

Nama Mahasiswa : **Irfan Fachri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016041068

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ita Prihandika, S.Sos., M.A

NIP. 19840630 201504 2 002

Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si

NIP. 19910924 201903 2 019

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliyana, S.IP., M.A

NIP. 1974050220 200112 2 002

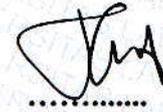
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji:

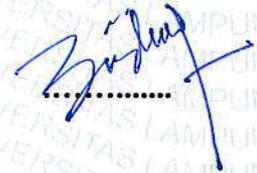
Ketua : Ita Prihantika, S.Sos., M.A



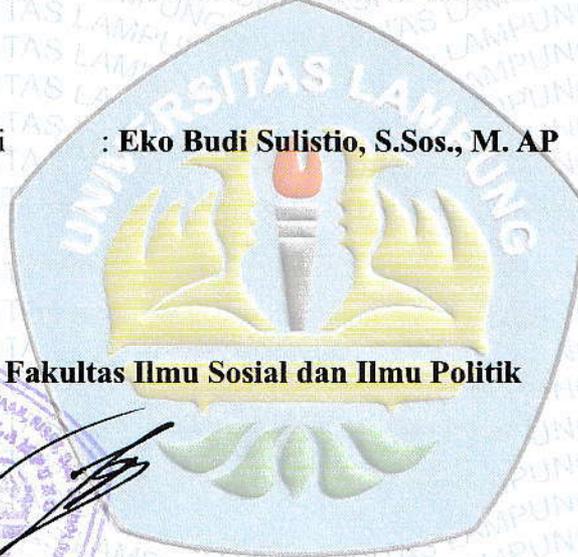
Sekretaris : Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si



Penguji : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M. AP



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Agustus 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lainnya, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Irfan Bachri

NPM 2016041068

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Irfan Fachri, lahir di Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 November 2002. Penulis merupakan putra dari Alm. Bapak Supono dan Ibu Rahmawati, anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis memiliki dua orang kakak yang bernama Bastian Adi Payoga dan Fera Laras Hati. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri 1 Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur yang selesai pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Metro, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro yang selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Metro, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro yang telah diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SBMPTN dan terdaftar sebagai salah satu Mahasiswa Aktif Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjalani perkuliahan penulis aktif menjadi anggota aktif Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) bidang Minat dan Bakat ditahun 2021-2023. Kemudian, pada bulan Januari dan Februari 2023 penulis mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 37 hari di Pekon Lombok Selatan, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya, penulis mengikuti Program Magang Magang Bersertifikat (PMMB) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro pada bulan Februari hingga Agustus 2023.

MOTTO

“Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh.”

(Ust. Hanan Attaki)

“Apa yang melewatkanmu, tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang menjadi takdirku, tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“Seberat apapun persoalan yang sedang dihadapi, yakinkan pada diri kita bahwa ini pasti selesai. Insyaallah ada solusinya, tidak mungkin Allah SWT titipkan kalau engkau tidak sanggup menjalaninya.”

(Ust. Adi Hidayat)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjadi pelindung, penolong dan pemberi kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Dengan ketulusan hati dan kasih sayang yang besar, aku persembahkan sebuah karya sederhana ini sebagai bentuk cinta dan terimakasihku kepada:

Orang Tua Tercinta, Alm. Bapak Supono dan Ibu Rahmawati

Terima kasih telah membesarkanku, mendidik, mendoakan serta selalu menyayangiku. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada Irfan. Semoga ilmu yang Irfan dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang sehingga dapat dijadikan sebagai amal jariyah untuk Alm. Bapak dan dapat membuat bangga Bapak dan Ibu. Semoga kelak keluarga kita bisa dipertemukan kembali di kehidupan selanjutnya di sisi terbaik Allah SWT, Aamiin.

Keluarga Besar dan Sahabat

Terimakasih atas segala dukungan, doa dan semangat yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Skripsi ini disusun sebagai bentuk bahwa penulis merasa sangat bahagia dan bersyukur karena bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh ilmu, pengalaman dan menjadi bagian dari Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji Syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya dan doa orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Metro”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Kepada orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua saya, Alm. Bapak Supono dan Ibu Rahmawati. Terima kasih sudah menyayangi, mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada saya untuk menghadapi apapun yang sedang terjadi, saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk kalian berdua.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan sumbangan pikiran, motivasi, kritik, dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini, semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai ibu dalam segala situasi.
3. Ibu Vina Karmilasari, S.Pd., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan sumbangan pikiran, motivasi, kritik, dan saran yang membangun dalam

penyusunan skripsi ini, semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai ibu dalam segala situasi.

4. Bapak Eko Budi Sulistio, Sos., M. AP., selaku dosen penguji saya. Terimakasih atas saran dan kritik yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai Bapak Eko dalam segala situasi.
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu dan pengalaman belajar yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh *staff* dan jajaran Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi dan selama menempuh studi pada masa perkuliahan.
9. Kepada kedua kakak kandung saya yaitu Bastian Adi Prayoga dan Fera Laras Hati yang selalu menjadi panutan saya dan selalu memberikan semangat dalam berbagai hal salah satunya dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Seluruh informan penelitian yang telah membantu dalam memperoleh data penelitian. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kalian.
11. Kepada Pakde dan Bude yang telah memberikan semangat dan tempat untuk mengerjakan skripsi yang sangat nyaman.
12. Kepada sahabat saya Tian, Bayu, Ibnu, Arbi, dan Krisna, terima kasih selalu menghibur dan telah memberikan warna dalam kehidupan penulis. Semoga kita diberikan kemudahan dalam setiap langkah yang kita ambil.
13. Kepada sahabat saya Alya, Erika, Ira, Anggi, Lulu, Alm. Ivan, Oman, Gagas, Dion, Pingga dan Aji yang telah memberikan dukungan dan semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan di masa yang akan datang.

14. Teman-teman magang MBKM Ari, Aurel dan Bunga yang menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan saling memberikan semangat selama pelaksanaan magang.
15. Kepada sahabat kontrakan yaitu Yahya, Kurnia, Hendra, Aziz, Irvan Oki, Evan, Alfinka, dan Tegar. Terima kasih telah menghibur penulis dan memberikan masukan serta saran dalam mengerjakan skripsi.
16. Sahabat saya Indra dan Ilham, terima kasih atas dukungan dan saran yang diberikan selama pelaksanaan perkuliahan. Semoga kita dapat bersama-sama dalam mencapai kesuksesan.
17. Fafa dan Rafif, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Semoga kesehatan dan kesuksesan menyertai kita.
18. Kepada seluruh teman angkatan ADAMANTIA, terima kasih untuk kebersamaan selama perkuliahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan di masa yang akan datang.
19. Kepada diri sendiri, terima kasih karena sudah berjuang sejauh ini. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi sekitar.

Semoga ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak kedepannya.

Bandar Lampung, Agustus 2024
Penulis,

Irfan Fachri

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-------------|
| DAFTAR TABEL | xvi |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 8 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| 2.2 Kebijakan Publik..... | 10 |
| 2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik..... | 10 |
| 2.2.2 Proses Kebijakan Publik | 11 |
| 2.3 Evaluasi Kebijakan..... | 13 |
| 2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan | 13 |
| 2.3.2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan | 14 |
| 2.3.3 Metode Evaluasi Kebijakan | 15 |
| 2.3.4 Indikator Evaluasi Kebijakan..... | 16 |
| 2.4 Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru..... | 18 |
| 2.4.1 Pengertian Kebijakan Sistem Zonasi | 18 |
| 2.4.2 Tujuan Kebijakan Sistem Zonasi | 19 |
| 2.4.3 Ketentuan Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi | 19 |
| 2.5 Kerangka Pikir..... | 22 |
| III. METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 24 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 24 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 25 |

| | |
|--|------------|
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 26 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 26 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 29 |
| 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahaan Data..... | 30 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | 32 |
| 4.1 Gambaran Umum | 32 |
| 4.1.1 Kota Metro | 32 |
| 4.1.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro | 35 |
| 4.1.3 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Metro | 37 |
| 4.1.4 Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Metro | 40 |
| 4.2 Hasil Penelitian..... | 42 |
| 4.2.1 <i>Input</i> | 43 |
| 4.2.2 <i>Process</i> | 69 |
| 4.2.3 <i>Outputs</i> | 89 |
| 4.2.4 <i>Outcomes</i> | 100 |
| 1.2 Pembahasan Penelitian..... | 109 |
| 4.3.1 <i>Input</i> | 110 |
| 4.3.2 <i>Process</i> | 119 |
| 4.3.3 <i>Outputs</i> | 127 |
| 4.3.4 <i>Outcomes</i> | 131 |
| V. SIMPULAN DAN SARAN..... | 140 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 140 |
| 5.2 Saran..... | 142 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 144 |
| LAMPIRAN..... | 149 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Persentase Kuota Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 | 2 |
| 2. Daya Tampung dan Jumlah Peserta Didik Diterima di Kota Metro | 4 |
| 3. Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut Bridgman & Davis..... | 16 |
| 4. Daftar Informan Penelitian..... | 27 |
| 5. Dokumen Penelitian | 28 |
| 6. Luas Wilayah Kecamatan di Kota Metro | 33 |
| 7. Penduduk Kota Metro Perkecamatan Menurut Jenis Kelamin | 33 |
| 8. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Metro Tahun 2021-2023..... | 34 |
| 9. Hasil PPDB SMP N 1 Kota Metro Beberapa Tahun Terakhir..... | 39 |
| 10. Hasil PPDB SMP N 8 Kota Metro Beberapa Tahun Terakhir..... | 42 |
| 11. Panitia Pelaksana PPDB SMP N 1 Metro | 44 |
| 12. Panitia Pelaksana PPDB SMP N 8 Metro | 46 |
| 13. Honor Panitia PPDB SMP N 1 Metro | 56 |
| 14. Honor Panitia PPDB SMP N 8 Metro | 57 |
| 15. Jumlah Siswa Lulusan SD & Diterima PPDB Zonasi | 68 |
| 16. Jadwal Pelaksanaan PPDB <i>Online</i> SMP Negeri di Kota Metro..... | 76 |
| 17. Pemenuhan Kuota Pendaftar PPDB SMP N 1 Metro | 78 |
| 18. Pemenuhan Kuota Pendaftar PPDB SMP N 8 Metro | 80 |
| 19. Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kota Metro | 82 |
| 20. Guru SMP N 1 Metro dan SMP N 8 Metro dengan Sertifikat Pendidik..... | 94 |
| 21. Matriks Evaluasi Kebijakan Zonasi | 136 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. Siklus Kebijakan Publik..... | 11 |
| 2. Kerangka Pikir | 23 |
| 3. Peta Wilayah..... | 32 |
| 4. Gedung SMP N 1 Kota Metro..... | 37 |
| 5. Struktur Organisasi SMP N 1 Kota Metro | 38 |
| 6. Gedung SMP N 8 Kota Metro..... | 40 |
| 7. Struktur Organisasi SMP N 8 Kota Metro | 41 |
| 8. Fasilitas Fisik PPDB Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Metro | 49 |
| 9. Ruang Pendaftaran & Ketersediaan Komputer SMP Negeri 1 Kota Metro..... | 50 |
| 10. Masjid & Toilet SMP N 1 Metro..... | 51 |
| 11. Tempat Parkir & Ruang Tunggu PPDB SMP N 1 Metro..... | 51 |
| 12. Ruang Pendaftaran & Ketersediaan Komputer SMP Negeri 8 Kota Metro... | 52 |
| 13. Mushola & Toilet SMP N 8 Metro..... | 53 |
| 14. Ruang Isi Formulir Pendaftar & Tempat Parkir PPDB SMP N 8 Metro | 54 |
| 15. Fasilitas Non Fisik PPDB <i>Online</i> di Kota Metro..... | 54 |
| 16. Buku Pedoman Pelaksanaan PPDB di Kota Metro..... | 61 |
| 17. Prosedur Pendaftaran PPDB <i>Online</i> di Kota Metro..... | 63 |
| 18. Persyaratan Pelaksanaan PPDB SMP Negeri di Kota Metro | 64 |
| 19. Website Pendaftaran <i>Online</i> PPDB Kota Metro | 65 |
| 20. Tahapan Pelaksanaan PPDB SMP Negeri Di Kota Metro | 70 |
| 21. Sosialisasi <i>Online</i> PPDB SMP N 1 Metro | 72 |
| 22. Sosialisasi <i>Online</i> PPDB SMP N 8 Metro | 74 |
| 23. Laporan Hasil PPDB Sekolah ke Dinas Pendidikan..... | 90 |
| 24. Proses Seleksi PPDB <i>Online</i> | 91 |
| 25. Lapangan Basket & Aula SMP Negeri 1 Metro..... | 92 |
| 26. Kondisi Ruang Kelas & Kantin SMP N 1 Metro | 93 |

| | |
|--|----|
| 27. Kondisi Fasilitas SMP Negeri 8 Metro | 97 |
| 28. Kondisi Ruang Kelas & Kantin SMP N 8 Metro | 98 |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu tindakan pertama yang dijalankan oleh sebuah lembaga pendidikan. Kegiatan ini melibatkan seleksi yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan kepada calon siswa (Ulfah, 2016). Sistem zonasi merupakan kriteria utama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) seperti yang berlaku sebelumnya. Sistem PPDB NUN ini mengakibatkan terbentuknya sekolah-sekolah unggulan atau favorit yang lebih diminati dan sekolah-sekolah pinggiran yang kurang diminati. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas pendidikan adalah dengan menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Tujuan utama dari penerapan sistem zonasi adalah sebagai strategi untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan berkualitas, serta untuk melayani kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat.

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud tersebut ialah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai jarak tempat tinggal rumah ke sekolah terdekat. Menurut Purwanti (2018), sistem zonasi adalah metode penerimaan peserta didik yang mempertimbangkan jarak atau radius antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Dengan sistem

zonasi, prioritas penerimaan diberikan kepada calon peserta didik yang tinggal dalam jarak terdekat dari sekolah tersebut.

Telah banyak pemerintah daerah yang menerapkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, salah satunya Pemerintah Daerah Kota Metro. Demi mendukung kelancaran pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2023/2024, maka disusunlah pedoman teknis pelaksanaan PPDB untuk TK, SD, dan SMP tahun pelajaran 2023/2024 di Kota Metro yang didasarkan oleh Peraturan Walikota Metro Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Metro. Berdasarkan pedoman teknis pelaksanaan PPDB untuk TK, SD, dan SMP tahun pelajaran 2023/2024 di Kota Metro, berikut merupakan daya tampung peserta didik pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdiri dari empat jalur pendaftaran, yaitu:

Tabel 1. Persentase Jumlah Kuota Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2023/2024 Berdasarkan Jalur Pendaftaran

| No. | Jalur Pendaftaran | Jumlah Kuota |
|-----|----------------------------------|--------------|
| 1 | Zonasi | 60% |
| 2 | Afirmasi | 15% |
| 3 | Perpindahan tugas orang tua/wali | 5% |
| 4 | Prestasi | 20% |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2023.

Dilihat dari tabel 1, kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat SMP Negeri di Kota Metro dilaksanakan melalui beberapa jalur pendaftaran yaitu zonasi dengan kuota pendaftaran paling banyak yaitu 60% dari daya tampung sekolah. Jalur kedua yaitu afirmasi yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu dengan kuota pendaftaran sebesar 15% dari daya tampung sekolah. Jalur ketiga yaitu perpindahan tugas orang tua dengan kuota pendaftaran paling sedikit yaitu 5% dari daya tampung sekolah. Jalur keempat yaitu jalur prestasi dengan kuota pendaftaran sebesar 20% dari daya tampung sekolah. Jika memang terdapat salah satu jalur pendaftaran yang tidak

terpenuhi, maka sisa kuota tersebut bisa dialihkan untuk ditambahkan pada jalur pendaftaran lainnya yang banyak peminatnya.

Selain itu pada tahap pendaftaran, seleksi, dan pengumuman penetapan dilakukan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dengan hanya mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan. Tahap selanjutnya yaitu daftar ulang dilakukan di sekolah tempat peserta didik tersebut diterima dengan membawa dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang ada serta menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA).

Berikut merupakan sekolah menengah pertama di Kota Metro beserta daya tampung dan jumlah peserta didik yang telah diterima pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2023/2024:

Tabel 2. Daftar Sekolah Menengah Pertama yang Menerapkan Sistem Zonasi Beserta Daya Tampung dan Jumlah Peserta Didik diterima di Kota Metro 2023/2024

| NO. | Nama Sekolah | Rombel | Kuota | | | | Daya Tampung | | | | Diterima | | | Sisa Kuota | |
|---------------|---------------------|--------|---------|--------|----------|-------------|--------------|--------|----------|-------------|----------|------------|----------|------------|------------|
| | | | Seluruh | Zonasi | Afirmasi | Perpindahan | Prestasi | Zonasi | Afirmasi | Perpindahan | Prestasi | Tugas Ortu | Prestasi | | Tugas Ortu |
| | | | | | | Tugas Ortu | | | | Tugas Ortu | | | | | Tugas Ortu |
| 1. | SMP Negeri 1 Metro | 9 | 270 | 152 | 41 | 13 | 54 | 152 | 41 | 13 | 54 | 41 | 13 | 54 | 0 |
| 2. | SMP Negeri 2 Metro | 8 | 240 | 144 | 35 | 12 | 48 | 159 | 21 | 2 | 44 | 21 | 2 | 44 | 4 |
| 3. | SMP Negeri 3 Metro | 8 | 240 | 144 | 35 | 12 | 48 | 153 | 35 | 3 | 47 | 35 | 3 | 47 | 1 |
| 4. | SMP Negeri 4 Metro | 8 | 240 | 144 | 35 | 12 | 48 | 144 | 35 | 12 | 41 | 35 | 12 | 41 | 7 |
| 5. | SMP Negeri 5 Metro | 7 | 210 | 125 | 32 | 10 | 42 | 135 | 32 | 0 | 42 | 32 | 0 | 42 | 0 |
| 6. | SMP Negeri 6 Metro | 7 | 210 | 125 | 32 | 10 | 42 | 134 | 32 | 2 | 42 | 32 | 2 | 42 | 0 |
| 7. | SMP Negeri 7 Metro | 7 | 210 | 125 | 32 | 10 | 42 | 155 | 3 | 0 | 29 | 3 | 0 | 29 | 13 |
| 8. | SMP Negeri 8 Metro | 6 | 180 | 108 | 27 | 9 | 35 | 85 | 17 | 0 | 7 | 17 | 0 | 7 | 70 |
| 9. | SMP Negeri 9 Metro | 7 | 210 | 125 | 32 | 10 | 42 | 152 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 31 |
| 10. | SMP Negeri 10 Metro | 6 | 180 | 108 | 27 | 9 | 35 | 117 | 27 | 0 | 35 | 27 | 0 | 35 | 0 |
| Jumlah | | 73 | 2190 | 1314 | 331 | 107 | 438 | 1428 | 251 | 32 | 353 | 251 | 32 | 353 | 126 |

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2023.

Pada tabel 2 terlihat beberapa sekolah seperti SMP N 1 Metro, SMP N 5 Metro, SMP N 6 Metro dan SMP N 10 Metro terpenuhi kuota pendaftarannya. Sedangkan beberapa sekolah lainnya mengalami kekurangan siswa seperti SMP N 9 Metro dengan sisa kuota 32 siswa dan SMP N 8 Metro dengan sisa kuota terbesar yaitu 70 siswa. Hal ini menunjukkan tidak meratanya penyebaran peserta didik di setiap sekolah di Kota Metro.

Peneliti memilih Kota Metro sebagai lokus penelitian karena selain Kota Metro dikenal sebagai Kota Pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Metro juga telah menerapkan PPDB berbasis sistem zonasi yang mendukung pemerataan pendidikan pada tingkat TK, SD, dan SMP. Peneliti ingin mengetahui apakah penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMP sudah sesuai dengan tujuan awal yaitu pemerataan pendidikan atau justru telah menyalahi tujuan tersebut. Berdasarkan pra-riset yang telah dilakukan peneliti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

Permasalahan pertama yaitu terdapat beberapa sekolah yang kekurangan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023/2024. Hal ini disebabkan karena dalam satu wilayah terdapat beberapa sekolah sehingga penyebaran peserta didik tidak merata. Selain itu banyak masyarakat yang masih pilih-pilih sekolah yang lebih mumpuni atau bisa dibilang cukup favorit di wilayah itu. Fenomena ini sesuai dengan tabel 2 sebelumnya, yang menyebutkan bahwa terdapat SMP yang kekurangan peserta didik seperti SMP Negeri 8 Kota Metro dengan jumlah sisa kuota paling banyak yaitu sebesar 70 peserta didik (Wawancara dengan Ibu Nur Oktaviani, admin PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2 Agustus 2023).

Permasalahan kedua yaitu masih terdapat praktik kecurangan yang dilakukan seperti orang tua berinisiatif untuk merubah titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik atau memanipulasi Kartu Keluarga (KK) dengan menitipkan anaknya kesaudara yang berdomisili dekat dengan sekolah pilihan.

Praktik seperti ini banyak terjadi di sekolah-sekolah berlabel sekolah favorit, orang tua masih beranggapan bahwa sekolah favorit menjadi sekolah terbaik untuk anaknya sehingga akan melakukan berbagai cara agar anaknya dapat diterima. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan sistem zonasi yaitu mempercepat pemerataan pendidikan (Wawancara dengan Ibu Nur Oktaviani, admin PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2 Agustus 2023).

Masalah ketiga yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak wali murid yang belum mengetahui tentang penggunaan aplikasi PPDB *online*. Hal tersebut tentunya membuat orang tua siswa mengalami kesulitan untuk melakukan pendaftaran PPDB secara *online* (Sumber: lampost.co, diakses pada 19 Agustus 2023).

Isu lain yang berkembang yaitu pelaksanaan PPDB dengan basis zonasi membuat siswa menjadi malas belajar sehingga menurunkan prestasi siswa karena mereka beranggapan bahwa mereka sudah pasti diterima atau tidak diterima pada sekolah yang mereka inginkan berdasarkan faktor tempat tinggal atau zonasi. Selain itu, karena sistem zonasi itu rata dengan tidak memandang siswa pintar atau kurang pintar, maka pengaruhnya di *attitude* peserta didiknya (Wawancara dengan Ibu Nur Oktaviani, admin PPDB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2 Agustus 2023).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Marini (2019), menjelaskan bahwa penerapan sistem zonasi terdapat permasalahan yaitu sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat belum optimal. Selain itu hambatan yang ada pada implementasi sistem zonasi yaitu aplikasi *online* yang disediakan mengalami gangguan, jaringan yang ada kurang memadai, aturan jalur prestasi baik akademik maupun non akademik membuat tidak terpenuhinya daya tampung yang ada, dan pola pikir masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan masih belum berubah. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah dan Anam (2019), menyebutkan beberapa kendala dalam penerapan sistem zonasi

yaitu belum adanya petunjuk teknis PPDB dari pemerintah daerah, sosialisasi terkait PPDB belum maksimal, pemerataan tenaga pengajar, tenaga administrasi serta sarana dan prasarana belum tercapai, dan kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah-sekolah yang menerapkan sistem PPDB.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdan (2023), menjelaskan bahwa penerapan sistem zonasi belum optimal karena fasilitas sarana dan prasarana belum merata, banyak wali murid tidak cakap teknologi sehingga kesulitan dalam mengakses PPDB, dan tidak semua sekolah menerapkan sistem zonasi. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Maharani (2021), menjelaskan beberapa permasalahan sistem zonasi yaitu sekolah mengalami kekurangan peserta didik dan juga kurang meratanya kualitas pendidikan sehingga banyak orang tua yang memilih sekolah berlabel favorit dan swasta. Kemudian Purwanti dkk (2019) juga menjelaskan bahwa pemisahan antara sekolah yang dianggap favorit dan non-favorit masih ada dan tidak dapat diatasi sepenuhnya. Ini tidak hanya disebabkan oleh pola pikir masyarakat, tetapi juga karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung dan kurangnya persiapan dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas di semua sekolah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan sistem zonasi di Kota Metro dengan tujuan untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan kebijakan zonasi dan mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat setelah penerapan sistem zonasi. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dengan melakukan evaluasi akan mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan zonasi tercapai yaitu pemerataan pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi.

Untuk mengevaluasi kebijakan zonasi, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Bridgman & Davis yang terdiri dari empat indikator utama yaitu *input*, *process*, *outputs*, dan *outcomes*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Metro”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis membuat rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana evaluasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kota Metro?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kebijakan zonasi layak untuk dilanjutkan dan juga memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan zonasi agar kebijakan zonasi di Kota Metro dapat berjalan lebih optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi, dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Metro.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak yang terlibat untuk melakukan perbaikan sistem zonasi sehingga permasalahan yang terjadi dari sistem ini bisa secepatnya diatasi, serta menjadi acuan bagi pembaca, masyarakat dan organisasi lain dalam mengimplementasikan kebijakan yang akan dilaksanakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian pertama yaitu oleh Marini (2019) yang menunjukkan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMA di Kota Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik. Namun dalam penerapannya terdapat permasalahan yaitu sosialisasi yang dilakukan SMA N 14 Bandar Lampung kepada masyarakat belum optimal, aplikasi *online* yang disediakan mengalami gangguan, jaringan yang ada kurang memadai, aturan jalur prestasi baik akademik maupun non akademik membuat tidak terpenuhinya daya tampung yang ada, dan pola pikir masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan masih belum berubah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Maharani (2021) yang menunjukkan bahwa secara umum penerapan sistem zonasi di SMA Negeri 17 Kota Bandar Lampung telah terlaksana dengan cukup baik. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa permasalahan yaitu sekolah mengalami kekurangan peserta didik pada pelaksanaan PPDB sistem zonasi dan juga kurang meratanya kualitas pendidikan sehingga banyak orang tua yang memilih sekolah berlabel favorit dan swasta.

Sedangkan penelitian Hasbullah dan Anam (2019) menunjukkan bahwa PPDB sistem zonasi di Kabupaten Pamekasan belum berjalan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya petunjuk teknis PPDB dari pemerintah daerah, sosialisasi terkait PPDB belum maksimal, pemerataan tenaga pengajar, tenaga administrasi serta sarana dan prasarana belum tercapai, dan kurangnya pengawasan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan terhadap sekolah-sekolah yang menerapkan sistem

PPDB. Kemudian penelitian Abdan (2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu belum dapat dikatakan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana belum merata, banyak wali murid tidak cakap teknologi sehingga kesulitan dalam mengakses PPDB, dan tidak semua sekolah menengah pertama di Kabupaten Pringsewu menerapkan sistem zonasi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Dian Purwanti dkk (2019) yang menunjukkan bahwa pemisahan antara sekolah yang dianggap favorit dan non-favorit masih ada dan tidak dapat diatasi sepenuhnya. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh pola pikir masyarakat, tetapi juga karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung dan kurangnya persiapan dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas di semua sekolah.

Relevansi antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terkait dengan adanya penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun keterbaruan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengevaluasi kebijakan zonasi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat sekolah menengah pertama di Kota Metro. Selain itu peneliti melakukan pembaharuan teori dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh Bridgman & Davis (Lintjewas, 2016) yang terdiri atas *input*, *process*, *outputs* dan *outcomes*.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

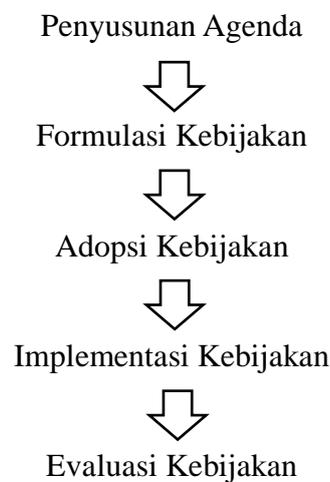
Menurut Dunn (Pasolong, 2013), kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam berbagai bidang tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan banyak bidang lainnya. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Dye (Rusli, 2013) yang mendefinisikan kebijakan negara sebagai pilihan-

pilihan yang diambil oleh pemerintah, baik untuk melakukan tindakan tertentu maupun untuk tidak bertindak sama sekali. Rose (Rusli, 2013) juga menggambarkan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang panjang, yang saling terkait dan memiliki konsekuensi berbeda bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan berbagai definisi oleh para ahli tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah kebijakan publik merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan untuk mencapai kepentingan bersama.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Lindblom (Mustari, 2015) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah suatu proses yang rumit karena melibatkan banyak langkah dan faktor yang harus dianalisis. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang tertarik untuk mempelajari kebijakan publik membagi proses pembuatan kebijakan publik menjadi beberapa tahap.

Berikut merupakan tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (Mustari, 2015) adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Kebijakan Publik

Sumber: Mustari, 2015

Berikut merupakan penjelasan dari gambar siklus kebijakan publik tersebut:

1. Penyusunan agenda

Berbagai masalah bersaing untuk mendapatkan perhatian dan menjadi bagian dari agenda kebijakan, karena tidak semua masalah memiliki prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada tahap ini, beberapa masalah mungkin tidak mendapatkan perhatian sama sekali, sementara masalah lainnya ditetapkan sebagai fokus utama pembahasan, atau ada juga masalah yang ditunda untuk waktu yang lama karena alasan tertentu.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang telah diterima dalam agenda kebijakan kemudian diberi solusi terbaik dalam pemecahannya. Solusi ini dapat berupa berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan, berbagai alternatif bersaing untuk dipilih sebagai tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

3. Adopsi kebijakan

Dari berbagai alternatif kebijakan yang diajukan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu dari alternatif tersebut diambil sebagai kebijakan yang akan dilaksanakan dalam konteks kebijakan publik.

4. Implementasi kebijakan

Keputusan mengenai program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif untuk mengatasi masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah di tingkat operasional. Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan mobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai atau dievaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil dalam mengatasi masalah yang ada.

2.3 Evaluasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Mustopadidjaja (Mustari, 2015) evaluasi kebijakan adalah proses untuk mengevaluasi atau menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi adalah kegiatan yang melibatkan pemberian nilai terhadap suatu "fenomena" dengan mempertimbangkan nilai-nilai tertentu. Menurut Anderson (Basir, 2019), evaluasi kebijakan dapat dianggap sebagai sebuah kegiatan yang mencakup estimasi atau penilaian mengenai aspek-aspek tertentu dari suatu kebijakan, termasuk substansi kebijakan itu sendiri, pelaksanaan kebijakan, dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Sementara itu, menurut Subarsono (Mustari, 2017), evaluasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang disusun dengan tujuan untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah.

Menurut Subarsono (Mustari, 2015) evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap kinerja suatu kebijakan. Dalam proses evaluasi, dapat ditemukan sejauh mana tujuan dan target dari kebijakan tersebut telah tercapai.
2. Mengukur efisiensi suatu kebijakan. Evaluasi dapat mengungkapkan besarnya biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan.
3. Menilai hasil atau *output* suatu kebijakan. Salah satu tujuan dari evaluasi adalah menentukan seberapa besar dan sejauh mana hasil atau *output* yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.
4. Mengidentifikasi dampak dari suatu kebijakan. Pada tahap selanjutnya, evaluasi digunakan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tersebut, baik dampak positif maupun negatifnya.
5. Mendeteksi adanya penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan yang mungkin terjadi

dengan membandingkan tujuan dan target dengan pencapaian yang telah terjadi.

6. Memberikan masukan untuk kebijakan di masa depan. Tujuan akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan yang dapat digunakan dalam perumusan kebijakan di masa mendatang, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih baik.

2.3.2 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, seperti yang dijelaskan oleh Dunn (Meutia, 2017):

1. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid dan dapat dipercaya tentang hasil kebijakan, tetapi tidak berusaha untuk menilai manfaat atau nilai hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.
2. Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid dan dapat dipercaya tentang hasil kebijakan, dengan mengevaluasi hasil tersebut berdasarkan tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara resmi oleh pembuat kebijakan dan administrator program.
3. Evaluasi keputusan teoritis (*decision theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid tentang hasil kebijakan yang dievaluasi oleh berbagai pelaku kebijakan. Evaluasi ini berusaha untuk mengungkapkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan, baik yang tersembunyi maupun yang dinyatakan.

Evaluasi kebijakan dapat dibedakan berdasarkan pertimbangan waktu dan kronologi perencanaan serta pelaksanaannya menjadi tiga jenis, menurut Westra (Puspaningrum, 2022):

1. Evaluasi sebelum program dilaksanakan (*pre-programme evaluation*), yang sering disebut juga sebagai studi kelayakan (*feasibility study*). Evaluasi ini dilakukan sebelum program dimulai untuk menilai potensi keberhasilan dan kelayakan program tersebut.
2. Evaluasi yang dilakukan ketika program masih berlangsung (*on-going evaluation*). Fungsi utama evaluasi ini adalah memberikan masukan dan saran untuk memperbaiki pelaksanaan program yang sedang berjalan.
3. Evaluasi setelah program selesai atau sudah berjalan cukup lama, sehingga diperkirakan telah mencapai hasil tertentu (*ex-post evaluation*). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai dampak program atau hubungan antara sumber daya yang digunakan (*input*) dengan hasil yang telah dicapai (*output*) oleh program tersebut.

2.3.3 Metode Evaluasi Kebijakan

Menurut Subarsono (Simanjuntak, 2016), terdapat beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program yang telah diimplementasikan. Metode-metode tersebut mencakup:

1. Metode *single program after-only*, di mana informasi diperoleh berdasarkan kondisi kelompok sasaran setelah program dijalankan.
2. Metode *single program before-only*, di mana informasi diperoleh berdasarkan perubahan kondisi sasaran sebelum dan setelah program dijalankan.
3. Metode *comparative after-only*, di mana informasi diperoleh berdasarkan kondisi kelompok sasaran program dan kelompok non-sasaran setelah program dijalankan.
4. Metode *comparative before-only*, di mana informasi diperoleh berdasarkan efek program terhadap kelompok sasaran sebelum dan setelah program dijalankan.

2.3.4 Indikator Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik yang telah dijalankan perlu dinilai untuk menentukan sejauh mana pencapaian tujuannya. Bridgman & Davis (Lintjewas, 2016) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator utama, yaitu:

1. Indikator *input* berfokus pada penilaian terhadap ketersediaan sumber daya dan bahan pokok yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ini mencakup aspek seperti sumber daya manusia, keuangan, atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator *process* berfokus pada penilaian bagaimana kebijakan diubah menjadi layanan yang diberikan langsung kepada masyarakat. Ini mencakup efektivitas dan efisiensi metode atau cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tertentu.
3. Indikator *outputs* berfokus pada penilaian hasil atau produk yang dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Contohnya, berapa banyak orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator *outcomes* berfokus pada pertanyaan mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat atau pihak yang terkena kebijakan tersebut.

Tabel 3. Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut Bridgman & Davis

| No. | Indikator | Fokus Penelitian |
|-----|--------------|--|
| 1. | <i>Input</i> | <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? b. Berapakah SDM (Sumber Daya Manusia), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan? |

| | | |
|----|-----------------|---|
| 2. | <i>Process</i> | a. Bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat? |
| | | b. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode/cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut? |
| 3. | <i>Outputs</i> | a. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik? |
| | | b. Berapa orang yang berhasil mengikuti program/kebijakan tersebut? |
| 4. | <i>Outcomes</i> | a. Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? |
| | | b. Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? |

Sumber: Lintjewas, 2016

Sedangkan menurut Dunn (Mustari, 2015) menyampaikan terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan sebagai berikut :

1. Indikator efektifitas (*effectiveness*) merujuk pada sejauh mana suatu alternatif mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan.
2. Indikator efisiensi (*efficiency*) berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Indikator kecukupan (*adequacy*) mengacu pada sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan memadai untuk memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang muncul sebagai akibat dari masalah yang ada.
4. Indikator kesamaan atau pemerataan (*equity*) mengacu pada distribusi hasil dan usaha kebijakan kepada kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kriteria kesamaan menilai sejauh mana kebijakan ini adil dalam memperlakukan berbagai kelompok yang terlibat.
5. Indikator responsivitas (*responsiveness*) berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

6. Indikator ketepatan (*appropriateness*) ini melibatkan penilaian kesesuaian tujuan kebijakan dengan situasi atau konteks tertentu, serta sejauh mana tujuan tersebut dapat dianggap tepat dan beralasan.

2.4 Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan awal yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dalam proses penerimaan ini, calon peserta didik akan melewati tahap seleksi atau penyeleksian yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Abidin dan Asrori (Halimah, 2020) yang menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru adalah sebuah kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolah setiap tahunnya, dan prosesnya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan pernyataan tersebut, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021, maka penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2023/2024 di Indonesia dilaksanakan melalui sistem zonasi.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan memegang prinsip-prinsip berikut:

1. Obyektif: PPDB harus bersifat netral dan bebas dari pengaruh serta tekanan pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan wewenang.
2. Transparan: PPDB harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat serta orang tua/wali calon peserta didik.
3. Akuntabel: Seluruh proses, prosedur, dan hasil PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkeadilan atau non diskriminatif: PPDB tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

2.4.1 Pengertian Kebijakan Sistem Zonasi

Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021

ialah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai jarak tempat tinggal rumah ke sekolah terdekat. Sistem zonasi adalah metode penerimaan peserta didik yang mempertimbangkan jarak atau radius antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Dengan sistem zonasi, prioritas penerimaan diberikan kepada calon peserta didik yang tinggal dalam jarak terdekat dari sekolah tersebut (Purwanti, 2019).

2.4.2 Tujuan Kebijakan Sistem Zonasi

Tujuan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini adalah untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, serta membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

2.4.3 Ketentuan Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi

Pada tahun pelajaran 2023/2024, seluruh tingkatan satuan pendidikan di Indonesia dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berpedoman pada isi Permendikabud No. 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Walikota Metro nomor 2 tahun 2022 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Metro.

Dengan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro tentang pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2023/2024 di Kota Metro.

Pedoman ini dibuat agar dapat dijadikan acuan pokok bagi setiap sekolah dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2023/2024. Berikut beberapa ketentuan dalam Pedoman Teknis PPDB SMP Negeri di Kota Metro tahun pelajaran 2023/2024, yaitu :

1. Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik
 - b. Pendaftaran
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran
 - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru
 - e. Daftar ulang
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Persyaratan calon peserta didik baru
 - b. Tanggal pendaftaran
 - c. Jalur pendaftaran (jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi)
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
3. Pendaftaran jenjang SMP dilakukan melalui mekanisme *online*/ dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman <https://www.smp.metroppdbonline.com>.
4. Kuota pendaftar setiap sekolah diatur dalam jumlah sebagai berikut:
 - a. Jalur zonasi SMP sebanyak 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. Jalur afirmasi SMP sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
 - c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali SMP paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - d. Jalur prestasi SMP sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

5. Apabila pada tahap seleksi kuota melebihi daya tampung dan terdapat kesamaan skor, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat dari sekolah.
6. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan melalui situs PPDB *Online* Kota Metro.
7. Saat daftar ulang, calon peserta didik wajib menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan juga menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran.
8. Terdapat 4 jalur penerimaan calon peserta didik baru yaitu:
 - a. Jalur zonasi adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai jarak tempat tinggal rumah ke sekolah terdekat.
 - b. Jalur seleksi afirmasi adalah ditujukan untuk memastikan masyarakat dari keluarga ekonomi tak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas.
 - c. Jalur seleksi perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan untuk mengakomodasikan peserta didik yang berpindah tempat tinggal karena hal yang tidak bisa dipilih (pekerjaan/tugas orang tua/wali).
 - d. Jalur prestasi ditujukan untuk membangun iklim kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik. Pada jalur prestasi dapat menggunakan rapor dan juga prestasi akademik maupun non akademik.
9. Pembagian wilayah zonasi:
 - a. Zona 1: wilayah kelurahan di tempat/ lokasi satuan pendidikan berada dan/atau kelurahan lain didalam wilayah Kota Metro yang berbatasan langsung dan berdekatan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - b. Zona 2: Semua wilayah kecamatan di luar ketentuan zona 1 di dalam wilayah Kota Metro.

- c. Zona 3: Wilayah di luar Kota Metro dalam satu Provinsi atau beda Provinsi.

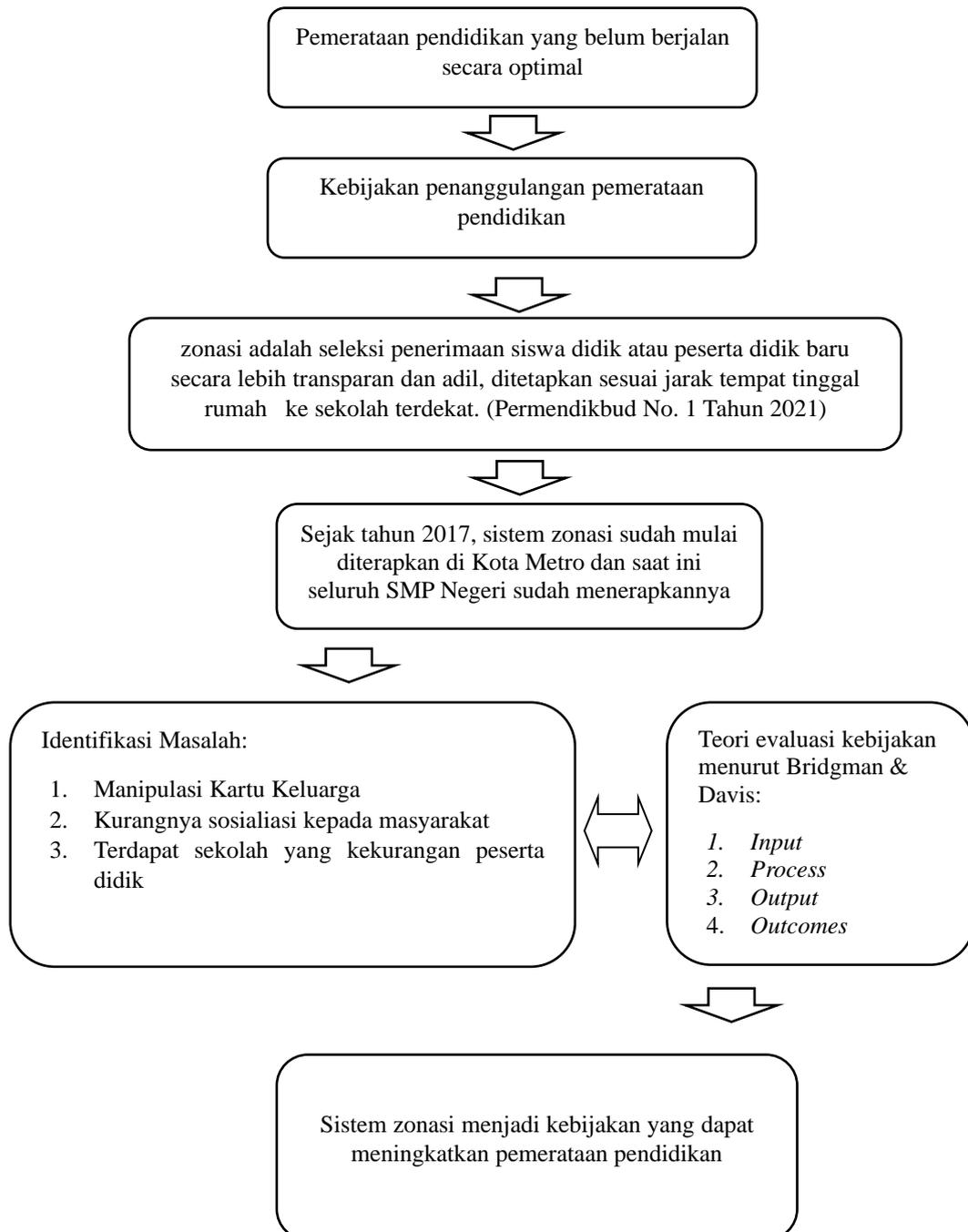
2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah gambaran alur pemikiran yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang mampu memberikan penjelasan kepada pembaca terkait permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengevaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Metro dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kebijakan zonasi dan mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat setelah penerapan sistem zonasi dalam PPDB tingkat SMP di Kota Metro yang didasarkan pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021.

Permasalahan yang ada dilapangan:

1. Manipulasi kartu keluarga atau merubah titik koordinat tempat tinggal ke daerah yang masuk dalam zona sekolah pilihan.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak orang tua/wali yang mengalami kesulitan untuk melakukan pendaftaran PPDB secara *online*.
3. Terdapat sekolah yang kekurangan peserta didik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi belum berjalan secara optimal untuk menciptakan pemerataan pendidikan. Maka untuk menilai keberhasilan kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Metro, penulis memiliki fokus utama yaitu dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Bridgman & Davis (Lintjewas, 2016). Teori ini memiliki empat indikator utama, yaitu *input, process, outputs, dan outcomes*.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Saryono (Nasution, 2023), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena sosial yang sedang terjadi dimasyarakat dan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada pada fenomena tersebut.

Peneliti berupaya untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru di Kota Metro. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan indikator penilaian dalam konteks kebijakan publik. Untuk mencapai hasil yang optimal, penulis perlu menghimpun data dan fakta yang terkait dengan fenomena yang akan diteliti dari beragam sumber. Setelah itu, informasi tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah ada, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif.

3.2 Fokus Penelitian

Seperti yang dijelaskan oleh Moelong (2017), dalam penelitian kualitatif, perhatian yang sangat penting adalah masalah dan fokus penelitian. Masalah penelitian menjadi titik tumpu yang mengarahkan peneliti dalam menentukan apa yang harus diteliti dan bagaimana mendapatkan data yang sesuai dengan

tujuan penelitian tersebut. Dengan memahami dengan baik masalah dan fokus penelitian, peneliti dapat menetapkan batasan penelitian yang diperlukan dan mengarahkan upaya mereka dalam mengumpulkan data yang relevan.

Fokus dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Bridgman & Davis (Lintjewas, 2016) yang menyampaikan terdapat 4 indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. Indikator *input*, berkaitan dengan sumber daya yang digunakan dalam implementasi kebijakan zonasi di Kota Metro yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur pendukung.
2. Indikator *process*, berkaitan dengan bentuk pelayanan kepada masyarakat serta efektifitas dan efisiensi dari cara yang dipakai dalam melaksanakan kebijakan zonasi di Kota Metro.
3. Indikator *outputs*, berkaitan dengan tujuan dari kebijakan dan kesesuaian antara tujuan dan hasil dari kebijakan publik.
4. Indikator *outcomes*, berkaitan dengan dampak yang diterima oleh masyarakat setelah adanya sistem zonasi baik bersifat positif ataupun negatif.

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Moelong (2017), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat. Adapun lokasi penelitian yang diambil penulis yaitu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, serta SMP Negeri 1 Kota Metro dan SMP Negeri 8 Kota Metro. Alasan memilih lokasi ini karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro sebagai pihak yang memonitoring pelaksanaan PPDB, SMP Negeri 1 Kota Metro merupakan salah satu sekolah favorit dan SMP Negeri 8 Metro pada PPDB tahun pelajaran 2023/2024 mengalami kekurangan peserta didik.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pandangan Lofland dan Lofland (Moelong, 2017), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sementara data tambahan meliputi dokumen dan sumber-sumber lainnya. Dengan demikian, peneliti membagi data dalam penelitian ini menjadi dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dapat dipercaya, yang berasal dari subjek penelitian (informan) yang terkait dengan variabel yang sedang diteliti (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini data primer didapatkan langsung dari wawancara, observasi atau pengamatan langsung dilokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah jenis sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, contohnya adalah data yang diperoleh melalui perantara seperti orang lain atau dokumen tertulis. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan untuk memperoleh data yang akan diteliti oleh peneliti, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Menurut penjelasan Sugiyono (2019), teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang memiliki ciri khas yang berbeda jika dibandingkan dengan teknik lainnya, teknik observasi tidak hanya terbatas pada interaksi dengan orang, tetapi juga mencakup pengamatan terhadap objek-objek alam lainnya. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan sistem zonasi di tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Metro.

Peneliti akan secara langsung melakukan pengamatan ke lokasi yang relevan, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, SMP Negeri 1 Kota Metro, dan SMP Negeri 8 Kota Metro.

2. Wawancara

Esterberg (Sugiyono, 2019), mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dengan tujuan untuk membangun makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan terkait penelitian yang dilakukan. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Metro. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

| No. | Nama | Jabatan | Instansi |
|-----|-------------------------------|--|---|
| 1. | Fezal Aferizal, S.H., M.Kn | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) | Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Metro |
| 2. | Nur Oktaviani | Admin PPDB 2023/2024 | Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Metro |
| 3. | Drs. Tri Wiyanto | Waka Kesiswaan | SMP Negeri 1 Kota Metro |
| 4. | Irfan Nur Arifani, M.T.I | Admin PPDB 2023/2024 | SMP Negeri 1 Kota Metro |
| 5. | Muslimah Andriani, S.Pd | Guru | SMP Negeri 1 Kota Metro |
| 6. | Ina Mutiawati, S.Pd | Guru | SMP Negeri 1 Kota Metro |
| 7. | Neni Setianing Astiani | Wali Murid SMP N 1 Kota Metro | Kota Metro |
| 8. | Elisabeth Suharni | Wali Murid SMP N 1 Kota Metro | Kota Metro |
| 9. | Dra. Lilik Firdayati | Kepala Sekolah | SMP Negeri 8 Kota Metro |

| | | | |
|-----|---------------------------|---|-------------------------|
| 10. | Ika Listikarinah, S.Pd | Admin PPDB 2023/2024 | SMP Negeri 8 Kota Metro |
| 11. | Aviva Amalia, S.Pd | Guru | SMP Negeri 8 Kota Metro |
| 12. | Maryani, S.Pd | Guru | SMP Negeri 8 Kota Metro |
| 13. | Rudi Setiawan | Wali Murid SMP N 8 Kota Metro | Kota Metro |
| 14. | Dwi Handoko | Wali Murid SMP N 8 Kota Metro | Kota Metro |
| 15. | Bambang Hermawan | Wali Murid Siswa Tidak diterima di SMP N 1 Metro | Kota Metro |
| 16. | Ermawati | Wali Murid Siswa Tidak diterima di SMP N 1 Metro | Kota Metro |

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019), dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, catatan angka, serta gambar yang berupa laporan dan keterangan lain yang dapat memberikan dukungan pada penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dari dokumen-dokumen tertulis, seperti perundang-undangan, arsip-arsip, dan foto-foto di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB tingkat SMP di Kota Metro. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa data dokumentasi seperti:

Tabel 5. Dokumen Penelitian

| No. | Nama Dokumen | Substansi Dokumen |
|-----|---|---|
| 1. | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 | Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan. |
| 2. | Buku Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik Kota Metro | Deskripsi dan data terkait Pembangunan Kota Metro diberbagai sektor. |

| | | |
|----|---|---|
| 3. | Peraturan Walikota Metro Nomor 9 Tahun 2022 | Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Metro. |
| 4. | Buku Pedoman Pelaksanaan PPDB di Kota Metro Tahun Pelajaran 2023/2024 | Ketentuan pelaksanaan PPDB tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Metro. |
| 5. | Surat Keputusan Wali Kota Metro Nomor 464/KPTS/D-01/2023 | Pembentukan Panitia Pelaksana PPDB Online Tingkat SMP Di Kota Metro Tahun Ajaran 2023/2024 |

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2019) analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya. Tujuannya adalah agar data tersebut dapat dipahami dengan mudah dan temuan-temuan yang dihasilkan dapat disampaikan kepada orang lain dengan jelas dan efektif.

Menurut Milles dan Huberman (Sugiyono, 2019) terdapat tiga komponen analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Proses reduksi data dapat diartikan sebagai upaya untuk merangkum informasi, memilih unsur-unsur yang esensial, serta memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang penting dalam data. Selama proses ini, peneliti berusaha untuk menemukan tema dan pola yang muncul. Hasil dari reduksi data adalah data yang lebih terstruktur dan terfokus, yang memberikan gambaran yang lebih jelas. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan juga memudahkan pencarian data jika dibutuhkan untuk tahapan penelitian berikutnya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, foto dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019), menyatakan bahwa yang paling sering menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dianggap sah atau valid ketika apa yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan realitas yang terjadi dalam objek penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, berbagai teknik pemeriksaan dapat digunakan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini mencakup:

1. Kredibilitas Data (*Credibility*)

Menurut Sugiyono (2019), terdapat beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas data yaitu melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi sumber data yang meliputi deskripsi data hasil wawancara dan diklasifikasikan menurut waktu, tempat dan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengujian Keteralihan Data (*Transferability*)

Pengujian ini berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian ini dapat diaplikasikan atau relevan dalam konteks yang berbeda. *Transferability* dapat tercapai ketika pembaca mendapatkan gambaran yang sangat jelas.

Karena itu, penelitian akan menyajikan laporan yang sangat terperinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*Dependability*)

Menurut Sugiyono (2019), uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Terkadang, peneliti mungkin tidak secara langsung terlibat dalam semua tahapan penelitian lapangan, tetapi mereka masih bisa mendapatkan data dari sumber lain. Maka perlu menguji *dependability*-nya.

4. Teknik Kepastian Data (*Confirmability*)

Teknik pengujian kepastian data (*confirmability*) dalam penelitian kualitatif, mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, implementasi kebijakan zonasi dalam pelaksanaan PPDB di SMP N 1 Metro dan SMP N 8 Metro secara umum sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dinilai layak untuk dilanjutkan. Namun, tentu tidak lepas dari berbagai macam kekurangan yang masih perlu diperbaiki agar tujuan dari kebijakan zonasi yaitu pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai. Hasil evaluasi peneliti rangkum berdasarkan teori evaluasi kebijakan menurut Bridgman & Davis (2000), sebagai berikut:

1. *Input*. Ketersediaan panitia, fasilitas, anggaran, buku pedoman, prosedur dan persyaratan dan ketersediaan siswa pendaftar PPDB sistem zonasi sudah cukup memadai di SMP N 1 Metro dan SMP N 8 Metro. Beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu kepanitiaan yang hampir tidak pernah berganti, gangguan sinyal, kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi kemasyarakatan, waktu pembagian buku pedoman yang terlalu dekat dengan pelaksanaan PPDB, sistem aplikasi PPDB yang belum optimal namun untuk PPDB tahun 2024 sistem aplikasi tersebut sudah dilakukan optimalisasi dan kuota pendaftar zonasi SMP Negeri di Kecamatan Metro Utara yang masih kurang.
2. *Process*. Seluruh kegiatan dan jadwal pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi di SMP N 1 Metro dan SMP N 8 Metro sudah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun untuk sosialisasi PPDB kemasyarakatan belum maksimal, target jumlah peserta didik yang mendaftar melalui *online* di SMP N 8 Metro belum tercapai dan kuota zonasi SMP Negeri di Kecamatan Metro Utara tidak mencukupi untuk menampung banyaknya lulusan siswa SD di Kecamatan tersebut. Faktor

utama yang menyebabkan hal tersebut yaitu fasilitas sekolah dan pemerataan guru berkualitas yang kurang baik di SMP N 8 Metro serta sekolah ini berada di Kecamatan Metro Utara yang merupakan daerah tidak padat penduduk. Dalam usaha pemenuhan target kuota pendaftar, SMP N 8 Metro melakukan pendaftaran *offline* setelah dilakukannya pengumuman hasil PPDB yang juga dikenal sebagai sistem *hybrid*. Pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi menemui hambatan internal yaitu adanya siswa yang ditolak saat mendaftar *online* tetapi mereka bisa daftar lagi tanpa memperbarui berkas dan terdapat *server down*. Namun, kedua hambatan tersebut sudah dilakukan optimalisasi kembali untuk PPDB tahun 2024. Hambatan eksternal yaitu adanya pejabat yang menitipkan anaknya, manipulasi kartu keluarga dan merubah titik koordinat, pendaftar jalur afirmasi yang tidak tepat sasaran, wali murid tidak faham bagaimana prosedur mendaftar PPDB secara *online* dan masyarakat tidak paham terkait pembagian wilayah zonasi, wali murid yang keras kepala ingin anaknya masuk bagaimanapun caranya dan banyak pendaftar *online* dari luar Kota Metro yang tidak menggunakan surat keterangan pindah rayon serta menggunakan kartu keluarga yang belum genap berusia satu tahun.

3. *Outputs*. Kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN 1 Metro dan SMPN 8 Metro sudah menerapkan prinsip pelaksanaan PPDB yaitu objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Meskipun tujuan dari sistem zonasi yaitu pemerataan kualitas pendidikan belum tercapai.
4. *Outcomes*. Kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Metro belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pemerataan pendidikan. Pemerataan hanya terasa pada kualitas siswanya, tetapi untuk kualitas pendidikan di setiap sekolah belum merata. Dampak positif sistem zonasi yaitu jarak antara rumah dengan sekolah semakin dekat dan kualitas siswa menjadi sama rata. Dampak negatif sistem zonasi yaitu menurunnya mutu pendidikan sekolah, kualitas dan perilaku siswa menurun, siswa yang berdomisili di daerah terpencil sulit mendapatkan

kualitas pendidikan yang baik, siswa yang pintar tetap bisa mendaftar ke sekolah pilihan diluar domisilinya menggunakan jalur prestasi, anak kurang termotivasi untuk belajar. Kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Metro layak untuk dilanjutkan tetapi perlu diikuti dengan pemerataan kualitas pendidikan mulai dari pemerataan guru berkualitas, fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana disetiap sekolah.

5.2 Saran

1. Saran Teoritis

Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dalam mengevaluasi kebijakan sistem zonasi dapat menggunakan teori lain dan memasukkan konsep-konsep baru mengenai kebijakan sistem zonasi yang belum dilakukan dalam penelitian ini sehingga dapat memperoleh hasil-hasil penelitian yang lebih baru dan lebih mendalam.

2. Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti bermaksud memberikan saran agar dapat bermanfaat bagi perbaikan kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB di Kota Metro, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Metro perlu melakukan pemerataan kualitas pendidikan baik dari kualitas guru, fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana sekolah, karena jika kualitas semua sekolah memiliki standar yang sama maka masyarakat dengan sendirinya akan menyekolahkan anaknya di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro perlu melakukan optimalisasi dan pengembangan berkelanjutan terhadap *server* dan sistem aplikasi PPDB *online* serta memperbaiki kendala lain yang terjadi.
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dan sekolah perlu meningkatkan sosialisasi PPDB melalui strategi dan metode yang tepat, misalnya melakukan sosialisasi secara langsung kepada calon peserta didik dan orang tua siswa serta melakukan inovasi dalam sosialisasi

online seperti melalui penyebaran video tutorial cara pendaftaran yang menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

- d. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Metro sebaiknya dapat mempercepat pembagian buku pedoman ke sekolah seperti dua sampai tiga bulan sebelum pelaksanaan PPDB agar panitia sekolah memiliki waktu cukup banyak untuk memahami isi dari buku pedoman tersebut.
- e. Sebaiknya setiap sekolah mengadakan regenerasi atau rotasi kepanitian agar pelaksanaan kegiatan PPDB dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan segala perubahan yang ada.
- f. Pemerintah Kota Metro sebaiknya dapat menambah jumlah kuota siswa pendaftar PPDB zonasi SMP Negeri di Kecamatan Metro Utara agar dapat mencakup seluruh lulusan SD di Kecamatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdan, M. (2023). Evaluasi Sistem Zonasi dalam Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Pringsewu (Studi SMPN 2 Sukoharjo dan SMPN 3 Pringsewu). Skripsi. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 2(1), 47-64.
- Andawiah, S. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Prespektif Stakeholder (Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo). Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kota Metro Dalam Angka Metro Municipality in Figures 2024*. Metro: CV. Jaya Wijaya.
- Basir, M., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pada Desa Batuma'lonro Kecamatan Biringbulu Di Kabupaten Gowa. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1(2), 72-79.
- Deviana, S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Ketepatan Waktu Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Kereta Api Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Penumpang Kereta Api Tanjung Karang – Kotabumi 2015-2017). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Bandar Lampung.
- Hafidzi, A., Wahani, D. A., & Halisa, N. (2019). Pendidikan Bermusyawarah Dalam Kehidupan Bernegara (Telaah Terhadap Hadits-Hadits Hukum Tatanegara). *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(1).
- Halimah, N. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMP Negeri Tangerang Selatan (Study Kasus SMPN 03 dan SMPN 17 Tangerang Selatan). Bachelor's thesis. Jakarta: FITK IIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112-122.
- Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari). *Jurnal Governansi*, 7(2), 99-110.
- Iswara, Z., & Fatimah, S. (2019). Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru: Studi Kasus Di SMPN 1 Banguntapan Bantul Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 8(1).
- Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 107-115.
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870-1879.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, 3(1).
- Lintjewas, T. &. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pembangunan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minasaha. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, Vol. 2.
- Maesarini, I. W., & Samsudin, S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Melalui Sistem Zonasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6), 679-686.
- Maharani, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Pendidikan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Siswa Didik Baru Di Sman 17 Kota Bandar Lampung.
- Marini, K. & Utoyo, B. (2019). Menimbang Kembali Kebijakan Sistem Zonasi: Studi Penerimaan Peserta Didik Baru Di Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 1(1).
- Marini, K. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung. Skripsi. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

- Meutia, I. F. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Moelong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morinda, A., & Winarni, F. (2020). Evaluasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 5(1).
- Mustari, N. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: eutikaprio.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Nurlailiyah, A. (2019). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 17(1).
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pazanudin, A. F., et al. (2023). *Statistik Daerah Kota Metro 2023*. Metro: Badan Pusat Statistik Kota Metro.
- Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kota Metro.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Walikota Metro Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Metro.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78-92.

- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bekti, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12-23.
- Puspaningrum, H. (2022). Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di DKI Jakarta. Skripsi. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Putra, C. G. A. K., Sulandari, S., Suastini, N. L. P., Astuti, N. K. S., & Rahayu, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Dasar No 6 Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 73-82.
- Rachmadhany, F. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di SMA Negeri Kota Bekasi. Disertasi. Universitas Negeri Jakarta: Jakarta.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publishing.
- Safitri, M. A., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1), 92-100.
- Satria, D. (2019). Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi DI SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Skripsi. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Sentosa, A., & Agustina, M. (2021). Panitia Pemungutan Suara Dalam Kesiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. *Jurnal Sociopolitico*, 3(2), 128-138.
- Simanjuntak, K. Z. (2016). Evaluasi Dampak Implementasi Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Sirojudin, D., Suryadi, S., & Zulaikha, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di DKI Jakarta. In *PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference On Technology, Education And Social Sciences)*.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: *Humanities Genius*.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Triwiniastuti, C. S., & Sulasmono, B. S. (2020). Evaluasi Program PPDB Berbasis Zonasi di SMP Negeri 2 Pabelan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 33-46.
- Ulfah, A. (2016). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik *Online* in Seminar Nasional Pengembangan Profesionalisme Pendidik untuk Membangun Karakter Anak, Vol. 1.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S. D. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(1), 29-37.